

Covid-19 dan Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kita

Oleh: Budi Kurniawan

Banyak hal yang bisa dilihat dan dipelajari dari fenomena *pandemic* covid 19. *Scientist* ilmu biologi kedokteran, farmasi dan ahli virus berusaha menemukan vaksin sebagai solusi penyakitnya. Epidemiologi berusaha mencari solusi masalah penyebaran penyakitnya yang memang menjadi masalah pokok covid-19 ini. Para pakar public health berusaha memecahkan masalah manajemen kesehatan dan rumah sakit termasuk masalah kapasitas laboratorium pengujian. Sebagai ilmuwan sosial yang kebetulan belajar kebijakan publik saya berusaha melihat masalah covid-19 dari sudut pandang penanganan impact ekonominya terhadap warga negara terutama bagi mereka yang kita kenal dengan kaum miskin.

Perlunya Jaring Pengaman Sosial

Miskin jika memakai indikator Badan Pusat Statistik (BPS) adalah mereka yang berpenghasilan 450 ribu kebawah perbulan per orang. Ambil contoh di kota tempat penulis bekerja Bandar Lampung, jika indikator ini digunakan maka ada sekitar 1 juta orang lebih di kota Bandar Lampung miskin. Namun, yang justru rawan adalah mereka yang hidup nyaris miskin. Mereka inilah yang jarang mendapat *treatment* baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Jika pemerintah pusat mempunyai program-program jaring pengaman sosial untuk mereka yang miskin seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu sembako, program Program Keluarga Harapan dan sebagainya, maka mereka yang nyaris miskin ini tidak tersentuh sama sekali. Untuk itulah kemudian mengapa pemerintah daerah perlu bersinergi dengan pemerintah pusat untuk membantu mereka yang nyaris miskin ini.

Lalu bagaimana kriteria mereka yang nyaris miskin? Indikatornya adalah gunakan standar Bank Dunia untuk kategori miskin. Jika Bank Dunia menyatakan bahwa orang miskin adalah orang yang penghasilannya 1,9 dollar per-hari, maka mereka yang penghasilan perbulannya 30 ribu rupiah per-hari kebawah atau sama dengan 900 ribu rupiah kebawah per-bulan adalah miskin sejatinya. Dengan demikian kita bisa memodifikasi kriteria bahwa orang yang nyaris miskin adalah mereka yang berpenghasilan antara 450 ribu hingga 900 ribu rupiah. Untuk itulah pemerintah perlu benar-benar memberi *treatment* kebijakan jaring pengaman sosial juga pada mereka. Karena dipastikan mereka ini akan berkurang bahkan kehilangan pendapatan karena lesunya ekonomi akibat kebijakan *work from home* dan termasuk belajar dari rumah bagi yang berjualan di sekitar sekolah.

Belajar dari negara lain ada beberapa kebijakan jaring pengaman sosial yang bisa ditiru oleh Indonesia dalam hal ini pemerintah pusat jika ingin ketika ada masalah pandemic di kemudian hari tidak lagi terkejut dan panik karena sudah ada sistem yang

mapan. Sudah saat Indonesia menerapkan kebijakan *universal basic income* dengan standar kemiskinan minimal versi Bank Dunia. Siapapun yang berpenghasilan perhari dibawah 16 ribu harus diberi subsidi sehingga mendapat income perhari per orang 16 ribu rupiah. Universal basic income adalah solusi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Dan kebijakan ini harus jadi program prioritas pemerintah ke depan. Paradigma pemerintah yang lebih fokus ke infastructure mercu suar yang banyak dinikmati kelas menengah ke-atas harus diubah. Jika pajak adalah *distribution of welfare* atau alat pendistribusian kesejahteraan dari yang kaya ke miskin, maka saatnya pajak dipakai untuk mendistribusikan kesejahteraan dari yang kaya ke yang miskin, bukan lebih banyak kembali ke jalan tol untuk jalannya mobil pribadi sang kaya seperti yang selama ini terjadi. Jikapun kembali ke infrastruktur, maka harus kembali ke infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi dan sebagainya¹.

Kebijakan kedua yang perlu dilakukan pemerintah ketika terjadi krisis kali ini adalah membuat orang bertahan tetap di rumah. Dahulu ketika krisis *great depression* di Amerika dan Eropa pada tahun 1930an, John Maynard Keynes, bapak ekonomi mazhab Keynesian, punya ide “aneh” yakni menyarankan pemerintah membuat kebijakan menggaji orang orang untuk mengali lubang lalu menutup lubang itu kembali². Banyak orang kehilangan pekerjaan dan Pemerintah kemudian harus menciptakan lapangan kerja agar orang dapat uang cash dengan beraktifitas dan ekonomi tumbuh kembali. Hari ini ketika terjadi wabah covid 19 ajaran ekonom Keynes ini sepertinya masih relevan namun perlu modifikasi untuk memaksa orang tetap di rumah agar penularan penyakit bisa diredam. Caranya adalah dengan mebuat mereka yang kehilangan pekerjaan untuk bekerja di rumah dengan membantu tenaga kesehatan dengan digaji oleh pemerintah. Bisa jadi hal yang bisa dilakukan adalah mereka diwajibkan menjahit masker dan alat pelindung diri atau APD, memasak makanan untuk tetangga yang miskin, atau jika memang sudah tidak bisa masak dan menjahit maka gaji saja mereka untuk berdiam di rumah dengan standar minimal layak hidup. Menggaji orang berdiam di rumah juga adalah salah satu ide yang juga “aneh” yang dilontarkan oleh ekonom dan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dalam beberapa wawancara di media.

Ekonomi *Pandemic* Versus Ekonomi Normal

Salah satu kesalahan pemerintah pusat di awal awal pandemi ini muncul adalah asumsi yang salah tentang keadaan ekonomi. Pemerintah pusat berasumsi bahwa

¹ Kekhawatiran banyak pengamat pembangunan adalah perubahan iklim yang akan jadi bencana krisis air yang berimbas kepada kelaparan di masa depan. Virus Corona bisa jadi membawa optimisme untuk mengerem perilaku rakus manusia yang merusak lingkungan dan ekosistem dalam menggunakan air baik untuk energi maupun industri pertanian yang kapitalistik. Ada hikmah di setiap musibah. Bumi sedang memperbaiki diri untuk masa depan anak cucu Kita. Harapannya kedepan model pembangunan tidak hanya memprioritaskan soal pertumbuhan ekonomi (*growth*) dengan program infrastruktur yang merusak resapan air seperti bendungan dan jalan tol. Tetapi juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Semoga setiap negara sadar belajar dari kesalahan masa lalu.

² Keynes, J. M. (2018). *The general theory of employment, interest, and money*. Springer. Lihat Book 3 Chapter 10, Section 6 hal.129. Buku asli Keynes ini edisi pertamanya dicetak tahun 1936.

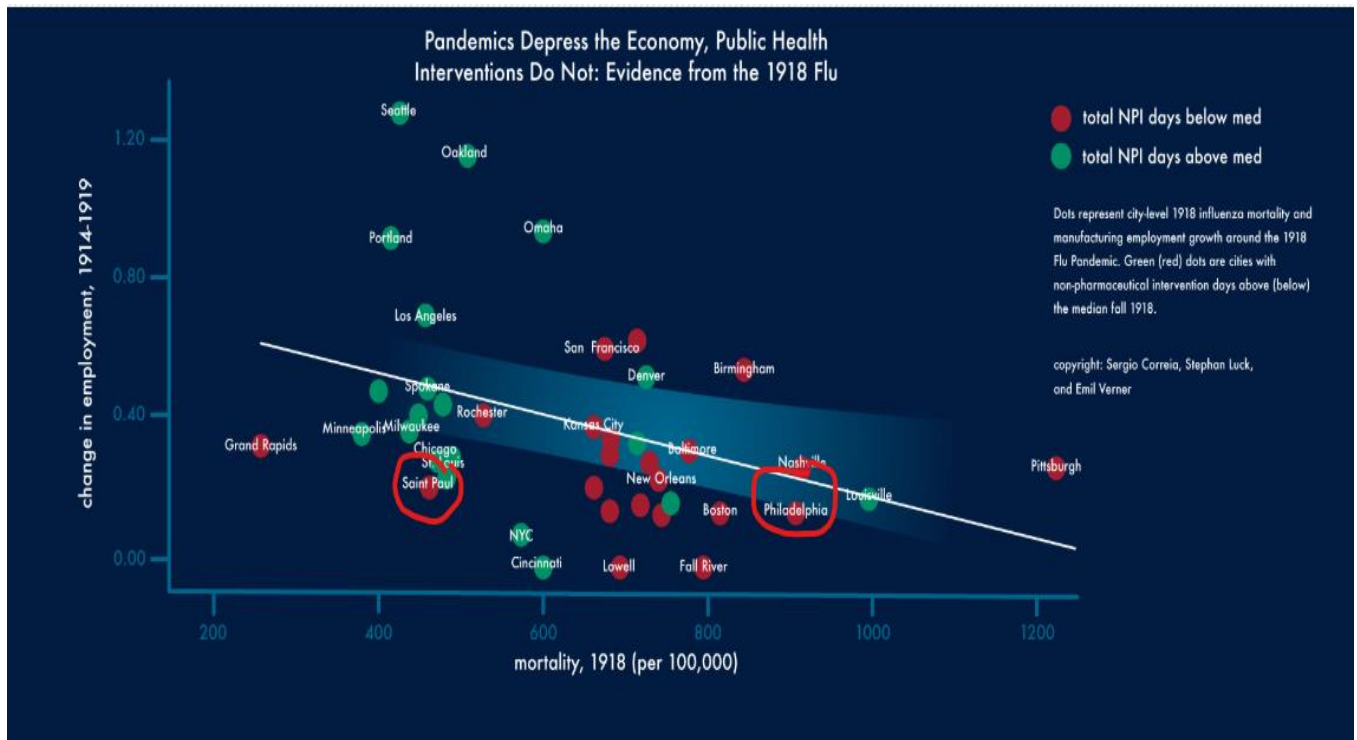
ekonomi saat wabah sedang mewabah adalah ekonomi normal. Sehingga ketika terjadi kelesuan pertumbuhan ekonomi di akhir kwartal ke 3 di tahun 2019 yang jatuh ke angka 4 persen, maka respon pemerintah adalah bagaimana memberi stimulus fiskal pada sisi demand di sector pariwisata dengan membayar influencer dan mendiskon tiket pesawat. Ini kebijakan yang tidak salah sebenarnya jika dalam paradigma ekonomi normal. Ada kelesuan sisi demand maka resepnya adalah memberi stimulus.

Namun pemerintah lupa, bahwa yang dihadapi ini adalah ekonomi pandemic yakni ekonomi ketika wabah penyakit menyerang dimana baik penjual dan pembeli akan memilih *stay* di rumah ketimbang belanja untuk pembeli dan memproduksi barang dan jasa bagi produsen. Akibatnya adalah di ekonomi pandemic pasar tidak terbentuk secara normal karena sangat sedikit penjual dan pembeli yang bertemu³. Pemerintah akhirnya menghadapi kegamangan yang akut pastinya pada saat pandemic. Jika mau mendorong daya beli masyarakat dengan stimulus fiskal seperti percuma karena di sisi yang lain yakni supply, barang yang mau dibeli masyarakat juga terbatas akibat tidak banyak yang diproduksi karena *work from home*. Implikasi seriusnya ancaman *hyper-inflation* di depan mata akibat kelangkaan barang plus adanya jumlah uang yang beredar banyak dari sisi aggregate demand. Yang minimalis bisa dilakukan pemerintah adalah stimulus fiskal dalam rangka hanya untuk masyarakat beli makanan dalam bentuk jaring pengaman sosial seperti yang dijelaskan sebelumnya dan produk-produk kesehatan agar bisa bernapas dalam jangka pendek dulu.

Ekonomi *pandemic* harus dihadapi dengan instrument kebijakan pandemic pula. Artinya selesaikan dulu virus secara medis dan epidemiologis baru kemudian ekonomi akan recovery. Data dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) misalnya menemukan fakta bahwa kota-kota di Amerika yang saat virus flu Spanyol tahun 1918 mewabah melakukan social distancing secara ketat akan lebih cepat pemulihan ekonominya yang juga parallel dengan jumlah korban meninggal yang juga sedikit dibandingkan kota-kota yang tidak melakukan social distancing. Gambar berikut menjelaskan hal tersebut, dimana kota seperti Philadelphia yang perubahan dalam ketersediaan tenaga kerjanya sebagai indicator recovery ekonomi lebih kecil dan lebih besar korban meninggalnya, jika dibandingkan St. Louis yang lebih cepat recovery ekonominya dan sedikit pula korban jiwanya. Philadelphia adalah kota yang tidak melakukan social distancing secara ketat sedangkan St. Louis melakukannya secara sangat ketat⁴. Di gambar itu dijelaskan juga bahwa kota-kota di Pantai Barat Amerika yang rata-rata berada di dekat sumbu X adalah kota-kota yang lebih ketat melakukan social distancing dan kota-kota yang menjauhi sumbu X adalah kota-kota yang tidak melakukan social distancing seperti Philadelphia.

³ Definisi Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli baik di pasar tradisional, pasar modal hingga pasar online yang mengandalkan jasa ekspedisi yang tentu juga diharuskan WFH.

⁴ https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/cities-strong-social-distancing-see-stronger-economic-recoveries?utm_source=mitsloanfacebookp&utm_medium=social&utm_campaign=economicrecovery&fbclid=IwAR1ON8M18wji3ZAnHRBx2hmuAGI-VXzJnYCr11J4xp6YZaPGaSkJ5cWmZko



Penutup

Kasus pandemic covid-19 ini akan membawa perubahan berarti bagi ekonomi dunia. Untuk itulah sudah saatnya Indonesia lebih memikirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka yang selama ini ditinggalkan dengan memberi benefit benefit kebijakan seperti universal basic income dan juga unemployment benefit. Namun, yang paling mendesak hari ini adalah menyelesaikan wabahnya dulu dengan pembatasan sosial yang lebih tegas dalam penegakan hukum baru kemudian ekonomi akan cepat pulih. Semakin cepat virus corona dikalahkan semakin cepat pula ekonomi membaik. Pikirkan nyawa warga negara dahulu baru berpikir ekonomi, karena instrument ekonomi normal apapun dalam kebijakan pemerintah tidak akan efektif jika virus belum dikalahkan. Oleh karena itulah penulis mendukung karantina wilayah secara ketat ketimbang kebijakan yang tanggung seperti PSBB yang justru membuat pasar dibawa kearah ketidakpastian.



Adalah dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, mengambil spesialisasi keahlian dalam bidang studi ekonomi politik dan pembangunan. Mengajar mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, Politik Keuangan Negara dan mendalami research dalam bidang game theory dan matematika permodelan untuk politik dan kebijakan publik di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Memperoleh gelar Master Public Policy dari Australian National University pada tahun 2012, sedangkan gelar Sarjana Ilmu Politik diperoleh dari Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM pada tahun 2005.